

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2015, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hartono, C. F. G. Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT. Alumni, Bandung.
- , 2015, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lebacqz, Karen diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 2011, *Teori-Teori Keadilan : Analisis Kritis terhadap Pemikiran J. S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2013, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2015, *Teori Hukum Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rifai, Achmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika Jakarta.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

- , 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J., 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- , 2015, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Vollmar, H. F. A. diterjemahkan oleh I. S. Adiwimarta, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Jakarta.

B. JURNALTESIS-DISERTASI:

- W, Imma Indra Dewi, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman”, *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 3, Oktober, 2008.

C. TESIS-DISERTASI:

- Imanuel, Irfan, “Kriteria Seseorang Tidak Cakap dan Implikasi terhadap Suatu Perjanjian Jual-Beli (Studi Kasus Putusan No. 153/PDT.G/PN.JKT-BRT jo. Putusan No. 3124 K/PDT.2013 jo. Putusan No. 53/PDT.G/PN.JKT-SEL)”, *Tesis*, Prodi Magister Ilmu Hukum Jakarta Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2016.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD 1945 dan Amandemennya*, Pustaka Mandiri Surakarta, Surakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum (Berita negara Republik Indonesia Nomor 1861 Tahun 2015).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa.

E. Internet:

Bayu Lebond, “Malingering Adalah Pura-Pura Sakit yang Merupakan Gangguan Mental”, <https://psyline.id/malingering-adalah-pura-pura-sakit-merupakan-gangguan-mental/>, psyline.id, tanggal akses 3 Februari 2020. Malingering adalah kebohongan mengenai kesehatan jiwa seseorang untuk menghindari dari suatu tanggung jawab.

“Alasan Terbaik Untuk Beralih Menggunakan Tes Psikometrik Online”, <https://unionspace.id/business-tips/2019/02/07/alasan-terbaik-untuk-beralih-menggunakan-tes-psikometrik-online/>, unionspace.id, tanggal akses 3 Februari 2020. Pemeriksaan psikometrik ditujukan untuk mengukur tingkat intelektual seseorang.